

**HUBUNGAN TOKOH AGAMA DAN POLITIK UANG TERHADAP
KONTRIBUSI PEROLEHAN SUARA H. AMIN, S.H PADA PILKADA
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2010**

Oleh:

Mohammad Ashif Fuadi

(14010110120091)

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum secara kepala daerah langsung merupakan manifestasi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Pilkada membuka peluang yang sama dari masing-masing calon atau kandidat untuk berkompetisi memperebutkan jabatan tertinggi yang memegang kekuasaan.

Faktanya, dalam Pilkada, incumbent tidak selalu menang dan penantang tidak selalu kalah. Akan tetapi, incumbent mempunyai posisi yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan penantang.

Salah satunya adalah di Kabupaten Ponorogo dimana penantang mampu mengalahkan incumbent dan yang mengalahkan incumbent tersebut adalah wakil bupati sendiri yakni H. Amin, SH.

Ini sebenarnya hasil yang mengejutkan banyak pihak. Karena sebelumnya diprediksi oleh banyak kalangan, incumbent akan menang dengan mudah. Tetapi fakta berkata lain justru H. Amin yang keluar sebagai pemenang.

Dalam hal ini yang akan diteliti adalah variabel atau faktor yang menyebabkan perolehan suara H. Amin, SH bisa meningkat drastis yang kemudian diambil tokoh agama dan politik uang sebagai variabel utamanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari hubungan antara tokoh agama dengan politik uang terhadap kontribusi perolehan suara H. Amin, SH pada pilkada 3 tahun silam.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian eksplanatif karena akan menguji suatu hipotesis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan tipe eksplanatif. Untuk metode pengumpulan datanya dengan cara penyebaran kuesioner kepada para responden.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sekunder yang kemudian dikaji dan dianalisa dengan pendekatan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh tokoh agama dan politik uang dalam pilkada kabupaten Ponorogo khususnya terhadap kontribusi perolehan suara H. Amin, SH yang kemudian menjadi bahan evaluasi dan memprediksi kecenderungan perilaku memilih masyarakat Ponorogo dalam menentukan pilihan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Kata Kunci : Kekalahan, *Incumbent*, Tokoh Agama, Politik Uang, Kontribusi Suara

A. PENDAHULUAN

Meskipun jumlah *incumbent* yang memenangkan Pilkada tergolong besar, namun juga ada kemungkinan lain *incumbent* akan dikalahkan oleh pesaingnya. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, Bupati *incumbent* Muhadi Suyono, SH yang menjabat pada masa bakti 2005-2010 tidak mampu mempertahankan kekuasaannya pada Pilkada selanjutnya. Bahkan beliau dikalahkan oleh wakilnya sendiri H. Amin, SH. Padahal *incumbent* mestinya banyak memiliki keuntungan ketika maju kembali dalam pemilihan umum periode berikutnya.

Dari kenyataan di atas, dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo keunggulan atau kekuatan *incumbent* tidak terlihat “kedigdayaannya”. Muhadi Suyono

Seorang bupati *incumbent* dikalahkan oleh wakilnya sendiri H. Amin, SH. Adakah kekuatan atau faktor lain yang mempengaruhi masyarakat atau pemilih dalam menentukan pilihan kepala daerah ?.

Pendek kata, menjelang Pilkada Kabupaten Ponorogo 2010, H. Amin, S.H akhirnya memutuskan untuk mencalonkan dirinya sebagai calon bupati melalui Partai Golkar berpasangan dengan ketua umum Partai Golkar Kabupaten Ponorogo Yuni Widyaningsih, S.H. Hal itu berarti, H. Amin, S.H sudah berpisah alias tidak berpasangan lagi dengan bupati *incumbent* Muhadi Suyono yang menjadi *partner* selama kurang lebih 5 tahun (periode 2005-2010) dan sekarang menjadi lawan politik di Pilkada 2010.

Pilkada di Ponorogo tahun 2010 sebenarnya pertarungan dan persaingan antara Bupati petahana (*incumbent*) Muhadi Suyono dengan wabupnya sendiri yakni H. Amin S.H.

Selama menjabat menjadi wakil bupati H, Amin, S.H sering datang “sowan” (pergi menghadap) ke ulama dan tokoh agama. Tentunya hal ini disinyalir bisa memberikan pengaruh terhadap kontribusi perolehan suaranya di Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010.

Dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo 2010 dari sisi finansial pasangan H. Amin, S.H dan Yuni Widyaningsih lebih “agresif” karena didukung oleh keuangan Partai Golkar dan donatur utama pasangan ini adalah suami dari Yuni Widyaningsih Ketua Umum Partai Golkar itu yakni bapak Sugeng Prawoto yang biasa dipanggil oleh “Pak Beruk” seorang pengusaha, kontraktor, bisnis properti,

dan juga pemilik bebepa rumah sakit swasta di Ponorogo, sehingga dalam operasional mesin partai tim suksesnya lebih agresif dan lancar.

Dengan memperhatikan situasi kondisi dan dinamika politik tersebut di atas, maka dengan seringnya H. Amin, S.H datang ke tokoh agama atau seorang kiai, keterlibatan para kiai dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo 2010 secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif.

Namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa masih ada di antara mereka yang memilih pandangan praktis dalam berpolitik: “siapa punya uang dia yang menang”. Ironisnya, pandangan seperti ini menyebar hampir ke semua kalangan, semua golongan, baik yang masuk kategori ekonomi lemah, menengah maupun atas, muda atau tua, santri maupun abangan.

Menjadi bukti nyata ketika Pilkada Kabupaten Ponorogo 2010, di Kecamatan Babadan, banyak pemilih yang tidak datang ke TPS (tempat pemungutan suara) karena mereka tidak mendapatkan “jatah uang” oleh masing-masing calon. Bahkan tidak sedikit yang melakukan tindakan anarkis dengan membakar kertas suara pemilih sebagai wujud kekecewaan mereka akibat tidak menerima uang dari calon. Hal ini mengindikasikan bahwa *money politics* masih sangat berpengaruh terhadap motivasi pemilih untuk memberikan hak suaranya.

Kasus di atas menggambarkan bahwa masalah yang dihadapi tentang politik uang ini adalah menyebabkan masyarakat tidak bisa membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik dengan politik uang. Singkatnya, terbangun pandangan umum bahwa politik uang dalam setiap kompetisi politik merupakan sebuah keharusan. Inilah yang kemudian menyebabkan semacam pandangan bahwa seolah hanya berkuat pada empat faktor yang berpengaruh dalam proses kompetisi politik, yaitu: uang, duit, money, dan fulus. Dengan cara *money politics* hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh daerah tertentu. Ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat. Melalui *money politics* kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan “uang”. Oleh karena itu, pemegang kedaulatan adalah “pemilik uang”.

Berbicara mengenai politik uang, dari ketiga calon bupati dan calon wakil bupati Pilkada Kabupaten Ponorogo 2010 di atas, pasangan nomor urut 2 H. Amin SH – Yuni Widyaningsih, SH memiliki keunggulan dari sisi finansial yang lebih dibandingkan calon yang lain. Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Ponorogo tanggal 24 Juni 2010 pasangan nomor urut 2 H. Amin SH - Yuni Widyaningsih, SH mempunyai dana kampanye Rp. 1.066.000.000 , dimana keterangan sumber dana hanya yang berasal dari pasangan calon saja. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Muhadi Suyono – Yusuf Pribadi mempunyai dana kampanye Rp. 705.000.000, dimana keterangan sumber dana berasal dari pasangan calon, sumbangan perseorangan dan sumbangan perusahaan. Sementara

pasangan nomor urut 3 Supriyanto-Nyamut Suseno (PRIMUS) memilih tidak melaporkan dana kampanyenya.

Ketika tokoh agama dijadikan sebagai panutan bagi sekelompok orang yang meyakini bahwa apa yang menjadi pilihan oleh tokoh agama tersebut merupakan pilihan yang terbaik dan juga merupakan hasil pemikiran dan ide yang bisa memberikan solusi lahirnya seorang pemimpin yang amanah dan tanggungjawab. Hal ini menyiratkan pengaruh tokoh agama dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2010.

Ketika janji-janji manis dari calon bupati tak kunjung terealisasi, masyarakat sudah cenderung apatis bahkan sudah tidak peduli dengan visi misi calon tertentu sehingga konstituen tidak akan memilih sesuai dengan hati nurani tetapi yang penting asal mendapatkan uang (*money politics*) dan bagi calon dengan pemberian tersebut pemilih wajib memilihnya saat Pemilu. Dengan adanya *money politics* yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Ponorogo 2010 maka hal ini diyakini akan memperikan pengaruh terhadap kontribusi perolehan suara salah satu calon bupati.

B. PEMBAHASAN

B.1 Gambaran tentang Identitas Responden

Dalam penelitian ini mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan prosentase sebesar 63,1 persen dengan sisanya berjenis kelamin perempuan. Faktor utama atas dominasi responden yang berjenis kelamin laki-laki tersebut adalah dimana akses penyebaran kuesioner terhadap responden yang lebih mudah ditemui.

Dilihat dari klasifikasi umurnya, jumlah responden terbanyak adalah yang rata-rata berumur 17-23 yakni sebanyak 74 responden sekitar 46,3 persen, atau hampir separuh dari total responden. Kategori usia ini termasuk pemilih pemula.

Distribusi agama responden secara keseluruhan adalah bergama islam, hal ini bisa dimaklumi mengingat komposisi agama menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo yang hampir mencapai 100 persen penduduk di Kabupaten Ponorogo beragama Islam.

Tingkat pendidikan responden didominasi mereka yang sudah menempuh jenjang pendidikan SMA dan S1 dengan perbandingan prosentasenya 33,1 persen dengan 30 persen. Disparitas tingkat pendidikan yang berbeda itu bisa terjadi sesuai dengan lokasi sampel dimana tingkat pendidikan yang ada di daerah perkotaan (kecamatan ponorogo dan kecamatan babadan) lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan yang ada di daerah pedesaan (kecamatan jenangan dan kecamatan ngrayun).

Dari item pertanyaan jenis pekerjaan dengan jumlah 78 orang (48,8%). Kategori lainnya di sini setelah penulis bertanya tanya kepada beberapa rersponden secara terperinci ada yang berprofesi sebagai guru, pelajar/mahasiswa, ada juga yang sebagai ibu rumah tangga, pedagang, tukang sayuran, dan lain-lain. Jadi sangatlah wajar jika komposisinya paling besar diantara yang lain.

Responden cenderung apatis dengan kegiatan aktif di partai politik dengan alasan yang berbeda antara responden satu dengan yang lainnya. Hal tersebut juga

menggambarkan bahwa masyarakat masih kurang antusias dalam kegiatan politik praktis partai.

B.2 Pengaruh Tokoh Agama

Tingkat pengetahuan pemilih terhadap popularitas tokoh agama masih sangat tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa kabupaten ponorogo sebenarnya kawasan yang religius. Dengan kondisi semacam itu, maka posisi dari pada tokoh agama terbilang strategis. Semakin banyak orang dikenal maka, akan semakin banyak pula orang yang mempunyai rasa penasaran dan ingin tahu akan kesehariannya termasuk dalam hal ini bisa saja memberikan pengaruh.

Tingkat kepatuhan dan keteladanan masyarakat terhadap tokoh agama di ponorogo masih cukup tinggi. Angka kepatuhan dan keteladanan masih cukup tinggi menggambarkan peran dari tokoh agama di kabupaten ponorogo masih sangat besar. Sebagian besar responden masih menyandarkan tokoh agama sebagai panutan dan teladan. Masyarakat akan mematuhi saran atau nasehat yang baik dalam konteks yang umum yang berkaitan kebaikan pribadi dalam aspek akhlak dan perilaku kehidupan, bukan kepatuhan dan keteladanan dalam keputusan politik.

Berkaitan dengan peran tokoh agama yang terjun ke politik praktis, Bagi mereka yang sangat menyayangkan seorang tokoh agama yang terjun langsung ke politik praktis adalah dengan menimbang dan memperhatikan mengingat tugas dan fungsi dari tokoh agama itu sendiri sebenarnya adalah sebagai stabilitator masyarakat dan sebagai pengendali moral serta akhlak masyarakat. Sehingga tolak

ukur kesuksesan peran tokoh agama yang ideal bukanlah calon yang diusungnya menang dalam Pemilu akan tetapi bagaimana stabilitas sosial masyarakat di sekitarnya bisa terjaga, terutama moral dan etika orang-orang yang ada disekelilingnya.

Pengaruh tokoh agama terhadap keputusan politik pemilih dalam menentukan dilihat, mayoritas mengatakan netral atau tidak berpendapat, artinya tokoh agama bisa saja memberikan pengaruh terhadap pilihan, tetapi bisa juga tidak tergantung motivasi pemilih saat melakukan pilihan pada waktu itu. Akan tetapi secara keseluruhan cenderung mengarah kepada tanggapan yang tidak menyetujui selisihnya tidaklah banyak dengan yang menyatakan terpengaruh.

B.3 Pengaruh Politik Uang

Mayoritas responden sudah mengetahui dan memahami tentang politik uang. Sebenarnya mayoritas masyarakat memahami hakikat dan tujuan dari pemberian uang tersebut. Tingkat popularitas politik uang yang masih tinggi membuktikan adanya pembagian politik uang di lapangan yang terjadi saat atau menjelang Pemilu.

Mengenai tanggapan responden mengenai setuju tidaknya dengan politik uang adalah kebanyakan menjawab tidak menyetujui politik uang. Mereka beranggapan bahwa politik uang mencederai demokrasi. Politik uang akan membuka Politik merupakan alat kekuasaan . Mereka yang mengatakan tidak setuju dengan politik uang beranggapan bahwa politik uang itu sama hal nya

dengan membeli suara untuk membeli kedudukan. Sedangkan yang menyetujui sebenarnya hanya karena motif ekonomi.

Sedangkan mengenai tanggapan responden “tidak berpendapat” memiliki sebenarnya kecenderungan pada pendapat yang cari aman. Hal ini ibarat pepatah “malu-malu kucing”, malu-malu tapi sebenarnya mau. Artinya bahwa politik uang itu akan sah sah saja bila diberikan dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Jika pas hari itu menjelang pemilihan ada tim sukses yang memberikannya sedang dia juga pas membutuhkan, maka ia akan menerimanya, akan tetapi dengan konsekuensi yang tidak jelas karena si penerima belum tentu memilih terhadap yang memberikan uang.

Tentang tanggapan mengharapkan kedatangan tim sukses dalam arti membagi-bagikan uang kepada pemilih, kebanyakan responden menyatakan tidak mengharapkan. Hal tersebut sejalan dengan tanggapan mereka tentang alasan tidak setuju mereka dengan politik uang. Mereka yang mengharapkan sebenarnya terbentur dengan faktor ekonomi saja.

Kebanyakan responden menyatakan tidak terpengaruh dengan politik uang meskipun dengan melipatgandakan nominal uang. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa praktek politik uang ternyata kurang efektif untuk menjaring suara. Karena walaupun ada responden yang akan menerimanya, namun hanya sedikit yang akan memilih si pemberi politik uang.

Masyarakat itu sudah semakin cerdas dalam menyikapi politik uang. Mereka juga menyadari kalau politik uang itu sebenarnya hanya akan

menyebabkan kerugian bilamana calon tersebut benar-benar menang karena logikanya pasti akan berusaha untuk mengembalikan modal.

B.4 Kontribusi Perolehan Suara H. Amin, SH

Keunggulan pasangan H. Amin yang terletak pada kekuatan basis massa yang digerakkan oleh tokoh yang bisa mempengaruhi massa tersebut ditopang dengan tingkat popularitas H. Amin sendiri yang tinggi.

Dengan modal kedekatan H. Amin, SH terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di Kabupaten Ponorogo, dan juga didukung dengan pendanaan tim sukses yang lebih lancar, maka posisi pasangan ini secara psikologis lebih unggul.

Kelebihan dan kekurangan pasangan H. Amin, SH walaupun calon wakilnya yakni Yuni Widyaningsih kurang begitu dikenal oleh khalayak umum, namun hal itu mampu ditutupi oleh popularitas H. Amin. Akan tetapi dalam hal keuangan, Yuni Widyaningsih lebih kuat karena selain merupakan ketua Partai Golkar cabang Ponorogo, juga mempunyai suami seorang pengusaha yang akan menggelontorkan dana saat kampanye.

Sinergikan antara tokoh agama dengan politik uang dijadikan senjata ampuh oleh tim sukses H. Amin, yang berpasangan dengan Yuni Widyaningsih untuk mendulang suara Pilkada Ponorogo tahun 2010 khususnya untuk meraih suara di bawah atau *grassroot*.

B.5 Gambaran tentang Tabulasi Silang (*crosstab*)

Semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk tidak menyandarkan keputusan kepada pilihan tokoh agama semakin tinggi. Secara keseluruhan dari jawaban responden bahwa pilihan dalam menentukan calon lebih dipengaruhi alasan dan motivasi dari pemilih itu sendiri dan bukan mutlak dipengaruhi tokoh agama. Akan tetapi walaupun secara tidak secara mutlak, tokoh agama bisa memberikan pengaruh kepada konstituen. Dengan masyarakat yang memiliki klasifikasi/tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka akan cenderung melihat politik uang sebagai hal yang kurang menarik. Kebanyakan responden yang menyetujui politik uang adalah yang memiliki klasifikasi pendidikan SMA kebawah.

B.6 Hasil Analisis Kuantitatif

Hasil Nilai R^2 (*R Square*) menunjukkan pengaruh tokoh agama dan politik uang sebesar 28,3% terhadap kontribusi perolehan suara H. Amin SH, dengan perincian 20,3% dipengaruhi oleh tokoh agama dan 8 % dipengaruhi oleh politik uang Sedangkan 71,7 % dipengaruhi model lain.

Berdasarkan penghitungan uji F, $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($32,5 > 3,0536$), maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara tokoh agama dan politik uang secara bersama-sama terhadap terhadap kontribusi perolehan suara H. Amin, SH.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tokoh agama dan politik uang secara bersama-sama berpengaruh terhadap kontribusi perolehan suara H. Amin, SH dalam Pilkada ponorogo 2010 yang lalu.

Untuk menguji apakah masing-masing variabel signifikan, maka digunakan dengan uji t dengan hasil sebagai berikut :

a) Variabel tokoh agama

Berdasarkan penghitungan nilai t hitung baik secara manual maupun menggunakan alat bantu SPSS 17 menghasilkan angka 6,7. sehingga karena besarnya $t_{hitung} 6,7 > t_{tabel} 1,975189$, berdasarkan kriteria uji t parsial, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti secara parsial (sendiri-sendiri) X_1 (tokoh agama) mempengaruhi Y (kontribusi perolehan suara H. Amin, SH).

b) Variabel politik uang

Berdasarkan penghitungan nilai t hitung baik secara manual maupun menggunakan alat bantu SPSS 17 menghasilkan angka 6,23. sehingga karena besarnya $t_{hitung} 4,37 > t_{tabel} 1,975189$, berdasarkan kriteria uji t parsial, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti secara parsial (sendiri-sendiri) X_2 (politik uang) mempengaruhi Y (kontribusi perolehan suara H. Amin, SH).

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tokoh agama terhadap kontribusi perolehan suara H. Amin, SH pada Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2010 yang lalu. Dimana tingkat pengetahuan responden terhadap tokoh agama masih tinggi. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan dan keteladanan responden terhadap tokoh agama juga masih tinggi. Sebagian responden merasa pilihan tokoh agama akan menjadi bahan pertimbangan mereka. Akan tetapi, kebanyakan responden justru cenderung netral dalam menentukan pilihan dalam arti mereka mempunyai pilihan sendiri berdasarkan kriteria yang mereka sukai.
2. Demikian juga dengan politik uang dalam penelitian kali ini juga memiliki hubungan yang signifikan walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar. Masyarakat rata-rata sudah mengetahui praktik politik uang terutama menjelang Pilkada dan mayoritas sebenarnya tidak menyetujuinya. Kebanyakan responden menyatakan tidak terpengaruh dengan politik uang meskipun dengan melipatgandakan nominal uang. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa praktek politik uang ternyata kurang efektif untuk menjangkau suara. Karena walaupun ada responden yang akan

menerimanya, namun hanya sedikit yang akan memilih si pemberi politik uang.

3. Tokoh agama dan politik uang diujikan secara serempak melalui uji F, maka hasilnya juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara keduanya secara bersama menunjukkan pengaruh dalam kontribusi perolehan suara H. Amin, SH dengan prosentase yang tidak begitu besar yakni 29,3% dan 70,7% dipengaruhi oleh faktor atau model yang lain yang tidak disebutkan. Dengan perincian pengaruh tokoh agama sebesar 21,3 % dan pengaruh politik uang sebesar 8 %. Begitu juga bila diujikan secara parsial (sendiri-sendiri) melalui uji t, juga menunjukkan hubungan yang signifikan baik dari variabel tokoh agama maupun politik uang terhadap kontribusi perolehan suara H. Amin, SH dalam Pilkada.
4. Dengan masyarakat yang memiliki klasifikasi/tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka akan cenderung melihat politik uang sebagai hal yang kurang menarik. Kebanyakan responden yang menyetujui politik uang adalah yang memiliki klasifikasi pendidikan SMA kebawah.
5. Karena penelitian ini merupakan penelitian lanjutan saudara Tomy Cipta Persada yang mengangkat penelitian hampir sama dengan penelitian ini dengan judul “hubungan ketokohan dan politik uang terhadap perilaku memilih pada Pilkada trengalek 2010 “ dimana lokasi penelitiannya kurang lebih kurang berdekatan yakni Kabupaten Trenggalek dengan tetanganya Kabupaten Ponorogo, maka setelah dibandingkan terdapat perbedaan pada variabel pengaruh politik uang yang menunjukkan pengaruh signifikan

pada penelitian ini, sedangkan pada penelitian Saudara Tomy menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan.

C.2 Saran

1. Untuk penelitian yang akan datang supaya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor selain tokoh agama dan politik uang saja, dalam variabel yang menjelaskan kemengan dalam pemilu. Hal ini dikarenakan, dalam penelitian ini kedua variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 29,3 persen saja, sedangkan 70,7 persen sisanya dipengaruhi model lain. Penelitian ini belum memasukkan variabel atas aspek lain yang mungkin dapat mempengaruhi dan menyempurnakan hasil penelitian ini.
2. Sampel yang digunakan sebaiknya juga lebih banyak daripada sampel dalam penelitian ini, dengan demikian penelitian lanjutan tersebut dapat semakin mempunyai tingkat kepercayaan dan akurasi yang tinggi sehingga diketahui hubungan yang lebih komprehensif.
3. Mengenai politik uang yaitu banyak yang masih banyak yang merasa tabu kan hal itu, sehingga untuk mengungkap jawaban yang akurat dibutuhkan strategi dari peneliti misalnya dengan merahasiakan identitas dengan serahasia mungkin agar dalam merespon pertanyaan akan lebih jujur dan terbuka.
4. Saran kepada masyarakat ponorogo mendekati tahun politik (pileg dan pemilihan presiden) 2014 agar menjadi pemilih yang cerdas yaitu pemilih yang rasional dan obyektif. Dengan menetapkan diri sebagai pemilih

cerdas tentu memilih tidak sekedar asal memilih. Tapi berdasarkan kriteria pilihan. Seperti bagaimana melihat visi misi, integritas, *track record*, komitmen, dedikasi, dan menguasai berbagai masalah rakyat serta bertanggungjawab alias komitmen dengan program-program yang dijanjikannya.

5. KPU ponorogo perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat agar menghindari praktik politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2014. karena, pembangunan tidak akan berjalan maksimal apabila praktik politik transaksional terus dilestarikan. Untuk itu, KPU Ponorogo selaku salah satu elemen pelaksana Pemilu diminta menyerukan seruan ini lebih luas agar dunia politik Indonesia menjadi lebih bermartabat serta bebas dari politik uang. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dan menjadi pemilih cerdas yang tidak mudah tergiur dengan sejumlah nominal uang.

DAFTAR RUJUKAN

- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia.
- Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajagrafindo.
- Firmansyah, 2012. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Imawan, Riswanda dan Affan Gaffar, 1993. *Analisis Pemilihan Umum 1992 di Indonesia*. Laporan Penelitian Fakultas ISIPOL. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press.
- Indra Ismawan, 1999. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- John Scott, "rational theory", (Sage Publications, 2000). (terjemahan) dalam G. Browning, A. Halcli, dan F. Webster (ed), *From Understanding Contemporary Society: Theories of The Present*, edited by G. Browning, A. Halcli, and F. Webster.
- Mahfud, Azra, Azumardi, 2010. dalam Pahmi Sy, *Politik pencitraan*. Jakarta : GP Press.
- Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1982, hlm. Dalam Nurhasim, Moch. *Konflik Antar Elit Politik lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI, November, 2005.

Bukhori, Mukhtar, 2005. *Kumpulan Karangan Indonesia Mencari Demokrasi*, Yogyakarta : Insist.

Nicholas, Abercrombie dkk., 2010. *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ramlan Surbakti, 1997. *Partai, Pemilih dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Scott JC. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta : [ID]: LP3ES.

Soekanto, Soerjono, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : CV. Rajawali.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:m Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. , Jakarta : Grasindo.

Uma Sekaran, *Bussines Research*, 2013., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

[W. J. S. Poerwadarminta](#), 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* , Jakarta: Balai Pustaka,

Zamakhsyari, Dhofier, 1982. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES

Sumber arsip :

Ponorogo dalam angka 2013

Wawancara

Wawancara dengan Tim Sukses ADA, Ahmad Subkhi, tanggal 21 September 2013 jam 21.00 WIB di Studio Aswaja, Jl. Bathoro Katong No. 32

Internet

duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linier-berganda.html hari sabtu 15 maret 2014 jam 9.45 WIB

James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani*, Pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara, (Terjemahan) hlm.101-103 dikutip dari blog Muhammad Alhadad Fuadillah Habib, (2013), Patron-klien Dalam Struktur Ekonomi Desa, Surabaya, http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-64880-Pengetahuan%20Akademik-PatronClient%20Relationship.html (diakses hari Jumat 1 Maret 2013 Jam 19.44 WIB)

<http://coretan-arifudin.blogspot.com/2010/01/gagap-gempita-politik-ponorogo-ramai.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo

<http://kpud-ponorogokab.go.id/>